



PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, KESADARAN WAJIB PAJAK, EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Luthfi Adzanu Andrianto¹, Moh. Yuddy Yudawirawan²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan - Indonesia

Email : Ufi1008@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the low level of fiscal independence in several regions, including South Jakarta, despite the area's strong economic potential. The purpose of this study is to analyze the effect of information technology, taxpayer awareness, and the effectiveness of tax collection on regional fiscal independence. The study applies a quantitative approach with a survey method, in which questionnaires were distributed to 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Kebayoran Lama. The collected data were then analyzed using multiple linear regression to determine the relationship between the independent and dependent variables. The results of the analysis indicate that information technology and the effectiveness of tax collection both have a positive and significant effect on regional fiscal independence, while taxpayer awareness does not show a significant impact. These findings suggest that the success of fiscal independence in the region is more strongly influenced by structural and systemic factors, particularly the quality of tax collection mechanisms, rather than individual taxpayer behavior alone. Among the tested variables, the effectiveness of tax collection emerges as the most dominant factor in improving local revenue, emphasizing the importance of strengthening administrative systems and enforcement procedures. Furthermore, the positive role of information technology reflects the growing need to adopt digital solutions that facilitate efficiency, transparency, and accountability in tax administration. The conclusion of this study highlights that optimizing information technology and enhancing the effectiveness of tax collection are critical strategies for strengthening fiscal independence. In practical terms, these results can serve as a foundation for regional governments to formulate more independent and sustainable fiscal policies that support long-term development.

Keywords: *information technology, taxpayer awareness, tax collection effectiveness, regional fiscal independence.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Di Indonesia Memiliki Peran Penting Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah Yang Efektif Melalui Kemandirian Fiskal. Namun, Mayoritas Pemerintah Daerah Masih Menghadapi Tantangan Dalam Mengurangi Ketergantungan Pada Dana Transfer Dari Pemerintah Pusat. Data Badan Pemeriksa Keuangan (2020) Menunjukkan Bahwa Sebagian Besar Daerah Di Indonesia Termasuk Kategori "Belum Mandiri", Termasuk Kota Jakarta Selatan Yang Meskipun Memiliki Aktivitas Ekonomi Tinggi, Belum Optimal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi



Ini Menuntut Strategi Penguatan Fiskal Melalui Pengelolaan Pajak Yang Lebih Efektif, Penerapan Teknologi Informasi, Dan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak (Zakiah, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Zakiah, 2022) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPP Tahun 2020 mengklasifikasikan kemandirian fiskal daerah menjadi empat kategori yaitu “Belum Mandiri”, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri” dan “Sangat Mandiri”, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Rasio Indeks Kemandirian Fiskal

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian fiskal
$0,00 < \text{IKF} < 0,25$	Belum Mandiri
$0,25 < \text{IKF} < 0,50$	Menuju Mandiri
$0,50 < \text{IKF} < 0,75$	Mandiri
$0,75 < \text{IKF} < 1,00$	Sangat Mandiri

(sumber: (BPK RI, 2020)

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan BPK RI terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2020 pada 503 pemda, diketahui bahwa tidak ada satupun pemerintah daerah yang berhasil mencapai IKF Sangat Mandiri. Mayoritas pemerintah daerah berstatus “Belum Mandiri” yaitu sebanyak 443 pemda atau 88,07 persen, diikuti dengan pemda berstatus “Menuju Kemandirian” sebanyak 50 pemda atau 9,94 persen dan berstatus “Mandiri” sebanyak 10 pemda atau 1,99 persen. Selama kurun waktu 2013-2019, Pemerintah Kabupaten Badung menjadi satu satunya pemda yang memperoleh status “Sangat Mandiri”, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan status menjadi “Mandiri” akibat adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran akibat adanya pandemi Covid-19.

Namun demikian, masih banyak daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat kemandirian fiskal yang ideal. Salah satunya adalah Kota Jakarta Selatan, yang meskipun merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi, masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari data berikut:



Tabel 2. Data Klasifikasi Indeks Kemandirian Fiskal
Daerah Kota Jakarta Selatan Periode 2019 – 2024

Tahun	Dana Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Asli Daerah	Rasio IKF	Kategori kemandirian
2019	74.997.497.375.481	50.845.081.891.466	0,319	Menuju Mandiri
2020	57.234.618.785.469	38.085.985.616.631	0,285	Menuju Mandiri
2021	65.209.105.040.795	45.182.087.250.967	0,261	Menuju Mandiri
2022	77.796.647.728.301	55.662.834.753.592	0,301	Menuju Mandiri
2023	70.662.936.135.345	48.442.043.648.831	0,306	Menuju Mandiri
2024	74.946.825.859.889	50.466.744.400.403	0,310	Menuju Mandiri

(sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

Berdasarkan klasifikasi Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), nilai IKF Kota Jakarta Selatan selama enam tahun terakhir konsisten berada dalam kategori “Menuju Mandiri” Artinya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mencerminkan kemampuan fiskal yang optimal untuk menopang pembangunan secara mandiri. Kondisi ini menuntut adanya strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap peningkatan PAD dan pada akhirnya mendorong kemandirian fiskal daerah antara lain adalah teknologi informasi, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas pemungutan pajak.

Berdasarkan Fenomena Tersebut, Pertanyaan Penelitian Yang Diajukan Adalah: Apakah Teknologi Informasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Berpengaruh Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah? Secara Khusus, Penelitian Ini Ingin Menjawab Seberapa Besar Pengaruh Masing-Masing Variabel Tersebut Secara Simultan Maupun Parsial.

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Secara Empiris Pengaruh Teknologi Informasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Di Wilayah KPP Pratama Kebayoran Lama. Fokus Penelitian Diarahkan Pada Bagaimana Penerapan Teknologi Digital Dan Efektivitas Sistem Pemungutan Dapat Meningkatkan Kontribusi PAD Secara Signifikan.

Penelitian Ini Diharapkan Dapat Mengisi Kesenjangan Penelitian (Research Gap) Karena Masih Sedikit Studi Yang Menguji Ketiga Variabel Tersebut Secara Simultan Dalam Konteks Kemandirian Fiskal Daerah. Temuan Ini Memberikan Kontribusi Teoretis Bagi Pengembangan Literatur Akuntansi Publik Dan Kebijakan Fiskal Daerah, Serta Dapat Menjadi Dasar Pertimbangan Bagi Pemerintah Daerah Dalam Merumuskan Strategi Peningkatan Kemandirian Fiskal Yang Berkelanjutan.

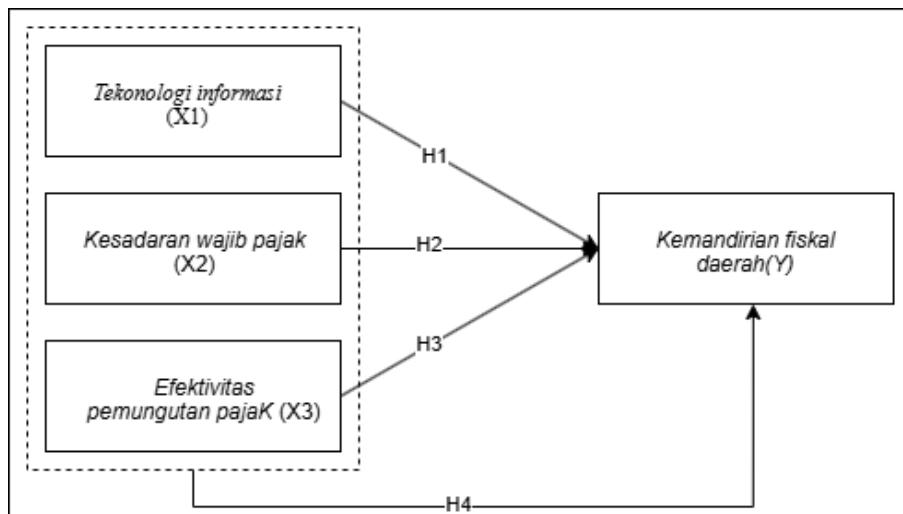
2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemandirian Fiskal Merupakan Indikator Kemampuan Daerah Membayai Pengeluaran Tanpa Ketergantungan Berlebih Pada Dana Transfer Dari Pemerintah Pusat



(Nahdia, 2021). Teori Desentralisasi Fiskal Menekankan Bahwa Semakin Besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), Semakin Tinggi Pula Tingkat Otonomi Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan (Saragih, 2022). Dalam Konteks Ini, Pajak Daerah Menjadi Komponen Utama Pembentuk PAD Yang Memerlukan Sistem Pemungutan Yang Efektif Dan Transparan.

Teknologi Informasi Diyakini Mampu Meningkatkan Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Melalui Digitalisasi Layanan Perpajakan Seperti E-Filing Dan E-Billing (Suryani, 2019). Selain Itu, Kesadaran Wajib Pajak Juga Dianggap Penting Untuk Mendorong Kepatuhan Sukarela, Yang Pada Akhirnya Memengaruhi Penerimaan Daerah (Latuamury Et Al., 2021). Namun, Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Tetap Menjadi Faktor Penentu, Karena Pengelolaan Administrasi Pajak Yang Profesional Akan Memaksimalkan Potensi Penerimaan (Afifah, 2021).



Gambar 1 Tabel Kerangka Berpikir

Berdasarkan Kerangka Tersebut, Penelitian Ini Membangun Hipotesis Bahwa Teknologi Informasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah, Baik Secara Simultan Maupun Parsial. Dengan Demikian, Pengujian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Empiris Pada Literatur Penguatan Kebijakan Fiskal Di Tingkat Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kuantitatif Dengan Metode Survei Untuk Menganalisis Pengaruh Teknologi Informasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Objek Penelitian Adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kebayoran Lama, Dengan Kriteria Wajib Pajak Aktif Yang Pernah Menggunakan Layanan Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi.

Data Primer Diperoleh Melalui Penyebaran Kuesioner Kepada 100 Responden Yang Dipilih Dengan Teknik Purposive Sampling, Dengan Mempertimbangkan Kemudahan Akses Dan Relevansi Responden Dengan Variabel Yang Diteliti. Penyebaran



Kuesioner Dilakukan Secara Langsung Maupun Melalui Media Daring Agar Menjangkau Responden Secara Optimal.

Data Yang Terkumpul Kemudian Dianalisis Menggunakan Teknik Regresi Linear Berganda Untuk Menguji Pengaruh Simultan Dan Parsial Masing-Masing Variabel Independen Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Proses Analisis Dibantu Dengan Perangkat Lunak Statistik Untuk Memastikan Validitas Dan Reliabilitas Data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.972	1.725		-0.564 0.574
	Teknologi Informasi	0.416	0.121	0.322	3.445 0.001
	Kesadaran Wajib Pajak	0.168	0.129	0.134	1.301 0.196
	Efektivitas Pemungutan Pajak	0.429	0.106	0.414	4.028 0.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Fiskal Daerah

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Temuan Ini Menunjukkan Bahwa Penggunaan Sistem Perpajakan Berbasis Digital, Seperti E-Filing Dan E-Billing, Mempermudah Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Fiskalnya. Hal Ini Mendukung Teori Perpajakan Modern Yang Menekankan Pentingnya Digitalisasi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi (Suryani, 2019). Secara Empiris, Hasil Ini Sejalan Dengan Penelitian Masprayoga Et Al. (2023) Yang Membuktikan Bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Mendorong Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik. Dengan Demikian, Optimalisasi Teknologi Informasi Dapat Memperkecil Ketergantungan Daerah Pada Dana Transfer Pusat Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Secara Parsial, Variabel Kesadaran Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Hasil Ini Mengindikasikan Bahwa Meskipun Sosialisasi Dan Edukasi Perpajakan Terus Ditingkatkan, Kesadaran Individu Belum Sepenuhnya Diikuti Oleh Kepatuhan Yang Berdampak Langsung Pada Penerimaan Daerah. Temuan Ini Memperkuat Hasil Studi Sebelumnya (Latuamury Et Al., 2021) Yang Menyebutkan Bahwa Kesadaran Wajib Pajak Seringkali Dipengaruhi Oleh Faktor Eksternal, Seperti Efektivitas Sistem Administrasi Pajak. Argumen Ini Menegaskan Perlunya Penguatan Insentif Dan Pengawasan Agar Kesadaran Wajib Pajak Dapat Diwujudkan Dalam Perilaku Patuh Yang Konkret.



Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Temuan Penting Lainnya Menunjukkan Bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak Memiliki Pengaruh Dominan Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Proses Pemungutan Yang Profesional, Transparan, Dan Terukur Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah. Hasil Ini Sejalan Dengan Teori Desentralisasi Fiskal Yang Menyebutkan Bahwa Kualitas Pengelolaan Pajak Lokal Menentukan Kapasitas Fiskal Daerah (Saragih, 2022). Penelitian Ini Mendukung Argumen Bahwa Peningkatan Efektivitas Pemungutan Lebih Berpengaruh Langsung Dibanding Hanya Mengandalkan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Semata.

Implikasi Akademik Dan Praktis

Secara Keseluruhan, Hasil Penelitian Ini Memperkuat Model Teoretis Bahwa Teknologi Informasi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Merupakan Pilar Penting Dalam Membangun Kemandirian Fiskal. Kontribusi Akademiknya Terletak Pada Pembuktian Simultan Ketiga Variabel, Yang Belum Banyak Dikaji Secara Terpadu Di Konteks Fiskal Daerah. Temuan Ini Memberikan Arah Bahwa Penguanan Sistem Digital Dan Manajemen Pemungutan Pajak Harus Berjalan Seiring Dengan Kebijakan Peningkatan PAD. Bagi Pemerintah Daerah, Hasil Ini Dapat Dijadikan Acuan Untuk Menitikberatkan Kebijakan Pada Modernisasi Sistem Pajak Dan Perbaikan Layanan Fiskal Guna Mengurangi Ketergantungan Pada Transfer Pusat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif yang melibatkan 100 responden dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kebayoran Lama serta hasil analisis regresi linear berganda, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Simultan Teknologi Informasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Efektivitas Pemungutan Pajak terhadap Kemandirian Fiskal Daerah
Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 53,681 dengan signifikansi di bawah 0,05, dan nilai R Square sebesar 0,624. Ini berarti bahwa 62,4% variasi dalam kemandirian fiskal daerah dapat dijelaskan oleh kombinasi ketiga variabel bebas, sedangkan sisanya (37,6%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Oleh karena itu secara simultan, variabel teknologi informasi, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas pemungutan pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah.
2. Pengaruh Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah
Hasil uji t menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,416 dan signifikansi 0,001 (< 0,05), yang berarti semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan, maka kemandirian fiskal daerah juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa media informasi yang andal, sistem yang responsif, dan pembaruan teknologi yang konsisten dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.



3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Nilai signifikansi sebesar 0,196 ($> 0,05$) dengan koefisien 0,168 menunjukkan bahwa walaupun hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kemandirian fiskal bersifat positif, pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik dalam konteks populasi yang diteliti. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat partisipasi atau literasi pajak yang belum merata di masyarakat.

4. Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Berpengaruh Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Dengan koefisien regresi sebesar 0,429 dan signifikansi 0,000, efektivitas menjadi variabel yang paling kuat pengaruhnya terhadap kemandirian fiskal. Artinya, semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak meliputi ketepatan target, waktu, dan metode penagihan maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk mandiri secara fiskal.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2021). *Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Publik, 5(2), 112–120.
- Latuamury, M., Primastiwi, N., & Dwi, R. (2021). *Kesadaran Wajib Pajak Dan Implikasi Kepatuhan Fiskal*. Jurnal Pajak Daerah, 4(1), 45–53.
- Masprayoga, I. P. F., Astuti, P. D., & Miati, N. L. P. M. (2023). *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, 4(2), 13–18.
- Nahdia, A. (2021). *Analisis Kemandirian Fiskal Daerah Di Indonesia*. Jurnal Keuangan Daerah, 3(2), 89–98.
- Saragih, R. (2022). *Desentralisasi Fiskal Dan Kemandirian Daerah: Sebuah Tinjauan Empiris*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(1), 55–63.
- Suryani, L. (2019). *Peran Teknologi Informasi Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 7(1), 25–31.
- Zakiah, K. (2022). *Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah: Studi Kasus Di Indonesia*. Jurnal Fiskal Dan Kebijakan Publik, 8(3), 150–159.